



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi Satu Data Kabupaten Purbalingga yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 7).
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90);
13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, Verifikasi dan Validasi DG serta IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
13. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan Daerah.
14. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.

15. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah serta merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
17. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
18. Forum Satu Data Daerah, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
19. Ketua Forum Satu Data adalah Koordinator yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten. dalam hal ini dikoordinatori oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
20. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
22. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengguna Data Spasial adalah Kementerian/lembaga/daerah/instansi, perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data Spasial.
24. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah Dokumen yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya DG Daerah dan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
 - b. terintegrasinya pengelolaan dan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
 - c. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan dan pertukaran data spasial oleh Perangkat Daerah;
 - d. terselenggaranya fasilitasi pengolahan dan analisis DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;

- e. terselenggaranya fasilitasi verifikasi dan validasi DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
- f. terselenggaranya fasilitasi penyimpanan DG Daerah dan IG Daerah oleh Perangkat Daerah;
- g. tersedianya sarana penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
- h. terwujudnya pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan DG Daerah dan IG Daerah yang terpercaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jaringan IG Daerah dan Simpul Jaringan IG Daerah;
- b. pengelolaan DG Daerah;
- c. pengumpulan DG Daerah;
- d. pengolahan DG Daerah dan IG Daerah;
- e. verifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
- f. penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan IG Daerah;
- g. penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah;
- h. penggunaan IG Daerah;
- i. koordinasi dan sinkronisasi;
- j. kerjasama; dan
- k. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB III JARINGAN IG DAERAH DAN SIMPUL JARINGAN IG DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai penanggung jawab penyelenggara IG Daerah, dan pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Pembina Data Spasial, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, dan seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data;
- (3) Dalam Penyelenggaraan DG dan IG Daerah mengacu pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan DG dan IG Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (4) Pembina Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
 - a. memastikan pelaksanaan DG Daerah dan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
 - c. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
 - d. memeriksa dan mengharmonisasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data;

- e. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan DG Daerah dan IG Daerah.
- (5) Walidata dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
- a. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan;
 - b. mengkoordinir Produsen Data dalam mengolah, mengelompokkan jenis data yang dilengkapi dengan metadata, serta memverifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
 - c. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG Daerah dan IG Daerah; dan
 - d. menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.
- (6) Produsen Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
- a. mengumpulkan DG Daerah yang dilengkapi dengan metadata;
 - b. mengolah DG Daerah menjadi IG Daerah;
 - c. menyimpan DG Daerah dan IG Daerah;
 - d. menyampaikan salinan DG Daerah dan IG Daerah kepada Walidata;
 - e. menggunakan IG Daerah; dan
 - f. melakukan koordinasi antar Produsen Data dan menyampaikan IG Daerah kepada Walidata.

BAB IV PENGELOLAAN DG DAERAH

Pasal 5

- (1) DG Daerah terdiri atas:
- a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (2) Selain DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DG yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
- a. DG yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. DG yang bersifat rahasia.
- (3) DG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diperoleh dari Pembina data.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diperoleh dari Produsen Data dan sumber lainnya yang sah.

BAB V
PENGUMPULAN DG DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam Pengumpulan DG dan IG Daerah dilakukan melalui tahapan kegiatan Perencanaan DG Daerah sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pengumpulan DG Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan DG Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan DG Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan DG Daerah yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) DG Daerah yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata.
- (6) Pengumpulan DG Daerah harus sesuai dengan standar pengumpulan DG yang setidaknya meliputi:
 - a. sistem referensi geospasial; dan
 - b. jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:
 - a. dilakukan di daerah terlarang; atau
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.
- (2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.

BAB VI
PENGOLAHAN DG DAERAH DAN IG DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengolahan DG Daerah dan IG Daerah meliputi pemrosesan DG Daerah dan Penyajian IG Daerah.
- (2) Pemrosesan DG Daerah dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar yang meliputi:

- (3) IG Daerah yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) IG Daerah yang disebarluaskan ke Kementerian/ Lembaga merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ lembaga yang bersangkutan.

Pasal 14

DG Daerah yang bersifat rahasia hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kegiatan berbagi pakai IG antar Perangkat Daerah atau unit kerja, mekanisme perizinan penggunaan IG Daerah oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta IG Daerah, klasifikasi data dan IG Daerah yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Walidata.

BAB X PENGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 16

- (1) Penggunaan IG Daerah merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna diizinkan untuk mengunduh, mendistribusikan, mengadaptasi atau membuat turunan IG Daerah, dengan syarat mencantumkan sumber informasi/data berasal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengguna tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan kembali IG Daerah.

BAB XI KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan IG Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Desa, masyarakat, Forum Satu Data, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, IG Daerah harus selaras, terkoordinasi dan menjadi unsur dalam Forum Satu Data.
- (3) Penyelarasan dan koordinasi penyelenggaraan IG Daerah dalam Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Forum Satu Data.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui data geospasial pembangunan, usul pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah.

BAB XIV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan IG Daerah, dilakukan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pembina Data Spasial dan Walidata.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan IG Daerah, dibebankan pada:





- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <i>Dinkominfo</i>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI